

STRATEGI PERTAHANAN SEMESTA MENJAGA IDENTITAS NASIONAL MENDUKUNG INDONESIA POROS MARITIM DUNIA

UNIVERSAL DEFENSE STRATEGY MAINTAINING NATIONAL IDENTITY SUPPORTING INDONESIA GLOBAL MARITIME FULCRUM

Endra Kusuma, Lukman Yudho, Deni Dadang

UNIVERSITAS PERTAHANAN RI

(sakti426@gmail.com, kamalekumdeplek@gmail.com, denidar87akmil@gmail.com)

Abstrak - Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia adalah salah satu bentuk implementasi mempertahankan kedaulatan negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang telah diperjuangkan dengan deklarasi Djuanda pada tahun 1957 hingga mendapatkan pengakuan dunia internasional melalui UNCLOS 1982. Indonesia pernah mencapai kejayaannya sebagai bangsa maritim pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Bangsa maritim Indonesia ini juga menjadi bagian integral dari identitas nasional Indonesia. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya untuk dapat menjaga identitas nasional sebagai bangsa maritim yang dapat dijadikan sebagai pijakan pembangunan kembali budaya maritim yang pernah ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan strategi yang tepat menjaga identitas nasional Indonesia sebagai negara maritim untuk mendukung visi Poros Maritim Dunia. Teori yang digunakan dalam analisis adalah teori konsep pertahanan semesta, teori *Sea Power* dan teori identitas nasional. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif menggunakan data sekunder dan selanjutnya menggunakan teori untuk menganalisa dari fenomena yang penulis teliti. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pertahanan semesta menjaga identitas nasional mendukung Indonesia poros maritim dunia menghasilkan tiga strategi turunan yaitu strategi menjaga kedaulatan teritorial, strategi pembangunan budaya maritim dan strategi penguatan diplomasi pertahanan.

Kata Kunci: Pertahanan, Teritorial, Budaya, Diplomasi, Maritim.

Abstract - The vision of Indonesia as a World Maritime Axis is one form of Indonesian state's sovereignty defending implementation as an archipelago which was fought for by the Djuanda Declaration in 1957 until it gained international recognition through UNCLOS 1982. Indonesia had reached its heyday as a maritime nation during the Srivijaya and Majapahit kingdoms. This Indonesian maritime nation has also become an integral part of Indonesia's national identity. Therefore, efforts are needed to be able to maintain a national identity as a maritime nation that can serve as a policy to rebuild maritime culture that has existed. The purpose of this research is to find the right strategy to maintain Indonesia's national identity as a maritime nation to support the vision of the World Maritime Axis. The theories used in the analysis are defense concept theory, *Sea Power* theory and national identity theory. This study uses qualitative data analysis techniques using secondary data and then uses theory to analyze the phenomena that the authors examine. The results of this study conclude that the national identity defense strategy to support Indonesia in the world's maritime axis produces three derivative strategies, namely the territorial sovereignty monitoring strategy, the maritime culture development strategy and the defense diplomacy strengthening strategy.

Keywords: Defense, Territorial, Culture, Diplomacy, Maritime.

Pendahuluan

Wilayah laut yang luas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berfungsi sebagai penghubung gugusan kepulauan yang berada di antaranya. Perjuangan untuk dapat menjadikan wilayah laut sebagai penghubung antar pulau tersebut masuk dalam satu wilayah kedaulatan Indonesia tidaklah mudah. Didahului dengan perjuangan Deklarasi Djuanda, yang menjelaskan bahwa wilayah darat, laut, dan udara di atasnya merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh. Deklarasi tersebut disuarakan pada tanggal 13 Desember 1957. Selanjutnya masyarakat internasional secara resmi mengakui konsepsi wawasan nusantara yang diperjuangkan Indonesia lewat Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 dalam *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS 1982). Sebagai tindak lanjut hal tersebut UNCLOS 1982 diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tanggal 13 Desember 1985. Sejak tanggal 16 November 1994 Unclos 1982 tersebut secara resmi mulai berlaku yang mengakui wilayah Indonesia yang meliputi wilayah darat, laut, udara dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk hak-hak Indonesia atas kawasan dan kekayaan alam diluar nusantara Indonesia (Marsetio, 2015). Hasil

perjuangan ini merupakan pencapaian yang luar biasa mengingat dibutuhkan waktu selama 28 tahun sejak deklarasi Djuanda untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional.

Pada masa kini sudah menjadi kewajiban generasi penerus harus dapat menjaga hasil-hasil yang diperjuangkan oleh para pejuang bangsa terdahulu. Terkait hal tersebut kebijakan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk implementasi mempertahankan hasil perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia untuk kedaulatan negara. Visi ini mengajak bagaimana rakyat Indonesia harus memandang negaranya sebagai negara kepulauan.

Dalam pertemuan *East Asia Summit IX* di Myanmar, 12-13 November 2014, Presiden Indonesia Joko Widodo menyampaikan rencana agenda pembangunan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dengan lima pilar utama. Kelima pilar tersebut adalah: 1) Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia; 2) Komitmen untuk menjaga dan mengelolah sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama; 3) Mengembangkan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri

perkapalan, serta pariwisata maritim; 4) Melaksanakan diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerjasama pada bidang kelautan dan menghilangkan sumber konflik; dan 5) Membangun kekuatan pertahanan maritim(Adam, 2015). Pilar pertama berupa membangun kembali budaya maritim Indonesia merupakan upaya nyata penguatan pondasi identitas nasional bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim.

Terkait dengan identitas nasional menurut Max Weber (dikutip mambura, 1983) cara yang terbaik untuk memahami sesuatu masyarakat adalah memahami tingkah laku anggotanya dan cara memahami perilaku anggota adalah dengan memahami kebudayaan mereka yaitu sistem makna mereka(Yudhyarta, 2015). Bangsa Indonesia memiliki sejarah budaya dengan dua kekuatan kerajaan maritim yang termasyur yaitu kerajan Sriwijaya dan Majapahit. Menurut Yani dan Montratama bahwa sejarah tidak hanya berupa dokumen atau catatan peristiwa masa lalu, namun juga menjadi sumber identitas dan inspirasi suatu bangsa untuk maju. Bangsa yang memiliki sejarah peradaban sebagai bangsa yang maju pada masa lampau, layak untuk mempunyai kebanggaan nasional (*national pride*) (Yani & Montratama, 2018). Membuktikan bahwa bangsa Indonesia dulu

pernah berbangga dengan dua kerajaan maritim besar yang pernah berjaya pada masanya sebagai salah satu sumber identitas nasional.

Namun demikian seiring dengan kedatangan bangsa kolonial Belanda identitas sebagai bangsa maritim sedikit-demi sedikit menghilang dan terkikis tergantikan dengan ciri bangsa Indonesia sebagai bangsa agraris. Hal ini dikarenakan Belanda lebih membutuhkan hasil bumi atau industri pertanian sebagai komoditi ekspor dari wilayah kolonialnya dengan cara tanam paksa. Perairan Indonesia kemudian menjadi batasan karena konsentrasi daratan pada kepulauan Indonesia lebih dutamakan. Bukan saja karena kehidupan masyarakat yang dengan terpaksa menghabiskan waktu di ladang, namun juga karena mereka tidak mempunyai kesempatan untuk berlayar mengarungi laut dan mengenal kepulauan Indonesia(Mulya, 2013). Oleh karena itu menjadi tantangan tersendiri bagaimana bangsa Indonesia untuk dapat menjaga identitasnya sebagai negara maritim mendukung kebijakan pemerintah menuju Indonesia Poros Maritim Dunia. Diperlukan suatu strategi pertahanan bersama yang melibatkan seluruh sumberdaya Indonesia untuk dapat mewujudkannya. Di Indonesia strategi pertahanan yang melibatkan seluruh sumberdaya nasional disebut

dengan strategi pertahanan semesta. Dengan demikian dibutuhkan sebuah strategi pertahanan semesta menjaga identitas nasional mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Metode penelitian

Penelitian ini disusun dengan cara penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu Melaksanakan pendalaman yang didapat dari literatur-literatur ilmiah, buku-buku, maupun sumber-sumber tulisan lainnya sebagai objek yang utama (Bakry, 2016). Jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif dimana penulis mendeskripsikan bagaimana upaya Indonesia dalam mempertahankan identitas nasionalnya sebagai bangsa maritim untuk dapat mendukung visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Sementara jenis data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang didapat dari hasil pencarian data melalui internet dan penelaahan studi kepustakaan. Teknik dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu Teknik studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dimana penulis menggunakan data sekunder, dilanjutkan menggunakan teori guna menganalisis fenomena dari suatu kejadian yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Secara historis pada abad 19 seorang ahli maritim amerika Serikat yang bernama Alferd Thayer Mahan yang menulis sebuah buku berjudul “*The Influence of Sea Power Upon History*” berdasarkan penelitian yang dilakukannya terhadap negara maritim Inggris. Teori Mahan ini di kemudian hari menjadi pedoman strategi maritim bagi negara-negara maritim guna mencapai predikat sebagai negara maritim yang ideal di masa-masa berikutnya. Terdapat enam syarat yang dirumuskan oleh Mahan untuk menjadi sebuah negara yang berpotensi mengembangkan *sea power* yaitu posisi geografi, bentuk tanah dan pantai, luas wilayah, karakter penduduk, jumlah penduduk yang bergiat ke laut dan karakter pemerintah (Mulya, 2013). Dengan demikian *sea power* ini dapat dikatakan mewakili bentuk suatu negara maritim yang ideal. *Sea power* ini telah diyakini dan diimplementasikan oleh nenek moyang bangsa Indonesia sebagai salah satu upaya strategis untuk mengendalikan jalur perdagangan serta memperluas dan mempertahankan otoritas kejayaannya jauh beberapa abad sebelum Mahan menginspirasi bangsa Amerika (Marsetio, 2013).

Dikaitkan dengan pendefinisian tentang identitas nasional beberapa ahli

memiliki sedikit perbedaan pendapat. Menurut Vedina dan Bauman identitas nasional adalah nilai yang melekat pada keanggotaan satu atau beberapa suku bangsa atau etnis, berbagai peneliti menghubungkan identitas etnis dengan faktor-faktor seperti bahasa, latar belakang budaya, wilayah geografis, kelas sosial, persepsi peristiwa sejarah, simbol dan mitos, yang menciptakan ruang komunikasi dan interaksi serta perbedaan biologis (Vedina & Bauman, 2009). Sementara itu Smith mengidentifikasi identitas nasional sebagai multidimensi dalam lima atribut fundamental yaitu tanah air atau wilayah bersejarah, ingatan sejarah dan mitos umum, budaya masyarakat yang umum, kewajiban dan hak hukum untuk semua anggota, system ekonomi dengan mobilitas teritorial untuk anggota. Secara umum beberapa pandangan tersebut kemudian dapat disimpulkan lebih ringkas oleh pemikiran Guibernau yang berpendapat bahwa identitas nasional memiliki lima dimensi yaitu psikologi, budaya, teritorial atau wilayah, sejarah dan politik (Guibernau, 2004).

Dari pemikiran Guibernau tersebut, maka pemikiran Mahan tentang *sea power* dengan pencirian negara maritim dapat dikatakan sebagai bagian dari identitas nasional. Mahan menyatakan bahwa negara

maritim harus memiliki enam elemen penting sebagai syarat dalam *sea power*, menjadikan elemen-elemen tersebut sekaligus sebagai unsur identitas nasional bangsa. Enam elemen tersebut adalah letak geografi, bentuk tanah dan pantai serta luas wilayah (identitas nasional dimensi teritorial), jumlah penduduk yang turun ke laut dan karakter yang dimiliki oleh penduduk (identitas nasional dimensi budaya), dan karakter pemerintah (identitas nasional dimensi politik). Dengan demikian enam elemen Mahan tentang negara Maritim diringkas menjadi tiga bagian dalam identitas nasional menurut Gibernau.

Kedudukan Geografi, Bentuk Tanah dan Pantai serta Luas Wilayah (Identitas Nasional dimensi Teritorial)

Kedudukan geografis adalah kedudukan suatu negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra, Indonesia juga memiliki posisi antara Benua Amerika dan Pantai Selatan Afrika dan terakhir Indonesia terletak di antara Terusan Panama dan Terusan Suez (Juan, 2013). Akibat posisi geografis Indonesia, maka dilihat dari sisi kemaritiman menjadikan Indonesia sebagai jalur pelayaran internasional. Jika kita melihat kedudukan geografis secara menyeluruh, maka Indonesia sangat

diuntungkan karena berada di persilangan jalur lalu lintas dunia, baik itu jalur pelayaran maupun jalur penerbangan serta dikelilingi oleh beberapa negara-negara yang sedang berkembang perekonomiannya. Lebih spesifik lagi Limbong dalam Mustari 2018 menyatakan Indonesia berkedudukan pada persimpangan perdagangan dan perekonomian internasional, baik negara-negara industri berkembang maupun negara-negara industri maju (Mustari, Supartono, & Barnas, 2018).

Posisi geografi Indonesia yang strategis menjadikan Indonesia sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.

Pernyataan ini juga didukung dengan keterangan yang disampaikan oleh menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai *Keynote Speaker* pada kegiatan Rapat Kerja Nasional IKA ITS dan *Focus Group Discussion* dengan tema “Meningkatkan Daya Saing Industri Maritim dan Konektivitas Menuju Optimalisasi Rantai Pasok Nasional Menuju Poros Maritim Dunia” 2018. Dalam pernyataannya Menteri Perhubungan menyampaikan bahwa sekitar 40% dari 90% perdagangan melalui jalur laut dunia diangkut melintasi wilayah Indonesia (Biro Komunikasi dan Informasi Publik, 2018).



Gambar 1. Rute Pelayaran Internasional
 Sumber:Rustam, 2018.

Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki panjang garis pantai lebih dari 81.000 km, 17.504 pulau dan luas laut teritorial sekitar 5,8juta km². Gugusan pulau yang luar biasa banyak tersebut, sebagian besar berupa pulau-pulau kecil yang diperkirakan lebih dari

10.000 buah pulau (Arsyad, 2015). Dengan jumlah pulau yang tersebar sedemikian banyak tidaklah mengherankan jika Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Penetapan bentuk negara kepulauan tersebut disepakati dalam konvensi hukum laut internasional

atau UNCLOS 1982, 25 tahun sejak Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957.

Bentuk geografi kepulauan ini membentuk masyarakat Indonesia menjadi bangsa maritim dengan menjadikan laut sebagai jalur perhubungan dan komunikasi antar pulau. Tidak pelak lagi kondisi tanah dan pantai Indonesia ini telah membentuk karakter bangsa sebagai bangsa maritim. Bahkan sejarah telah membuktikan dengan keberadaan kerajaan-kerajaan maritim yang pernah berjaya di nusantara seperti Sriwijaya, Majapahit sampai Demak merupakan kerajaan-kerajaan besar maritim yang disegani di kawasan Asia bahkan mungkin seluruh dunia (Wiranto, 2020).

Jumlah Penduduk Yang Turun ke Laut Dan Karakter Penduduk (Identitas Nasional dimensi budaya).

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke empat di dunia setelah China, Amerika dan India. Menurut hasil sensus penduduk tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia jumlah penduduk Indonesia sebesar 270,20 juta jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,25% selama periode 2010-2020 (Badan Pusat Statistik,

2021). Dari jumlah penduduk yang besar tersebut baru sekitar 2.313.006 orang yang bergiat dalam bidang kemaritiman seperti profesi pelaut, pelayaran rakyat, kapal niaga, nelayan, pelabuhan serta sektor bahari, tenaga kerja eksplorasi lepas pantai, termasuk didalamnya unsur pertahanan dan keamanan maritim, dalam hal ini adalah TNI Angkatan Laut (Marsetio, 2015). Fakta menyatakan bahwa 5-7% dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia adalah nelayan yang rata-rata dari mereka merupakan masyarakat dengan perekonomian menengah kebawah. Parameter ini diperoleh dari Indeks Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (IKMP) (Suib & Sakdiyah, 2019). Indikasi atau parameter acuan sebagai minimnya penduduk Indonesia yang turun ke laut atau bekerja dalam sektor maritim sebetulnya dapat dilihat dari sumbangan PDB Maritim kepada PDB Nasional tahun 2016 sebanyak 6,04%. Nilai kontribusi tersebut menurun jika dibandingkan dengan kontribusi pada tahun 2010 sebesar 7,36% (Kemenko maritim dan investasi, 2019). Minimnya pendapatan nasional dari sektor maritim ini juga membuktikan bahwa karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari atau berwawasan kemaritiman sebagai identitas nasional

telah mengalami degradasi atau penurunan.

Karakter Pemerintahan (Identitas Nasional dimensi politik)

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) termasuk didalamnya telah menuangkan konsep gagasan tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia (Hidayat & Ridwan, 2017). Visi ini sekaligus menegaskan karakter bangsa Indonesia adalah bangsa maritim yang dalam sejarahnya pernah mencapai kejayaannya pada masa kerajaan-kerajaan nusantara dulu.

Sebelumnya melalui perjuangan yang tak kenal lelah bangsa Indonesia berhasil memperjuangkan pengakuan terhadap bentuk negara kepulauan. Sebuah usaha yang didorong dengan semangat kebaharian memandang laut bukan sebagai pemisah namun sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang mendiami gugusan kepulauan Nusantara. Pada tanggal 10 Desember 1982 dalam sidang terakhirnya di *Montego Bay* Jamaika sebanyak 117 negara mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan, kemudian Indonesia menindaklanjuti pengesahan hukum laut dalam konvensi PBB ini melalui Undang-Undang Nomor 17

Tahun 1985, genap 28 tahun setelah Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 (Marsetio, 2015). Dengan demikian bangsa Indonesia dapat melihat wilayah kedaulatannya secara bulat dan utuh. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.4 Tahun 1960 tentang perairan Indonesia digunakan sebagai perkuatan kedudukan hukum Deklarasi Djuanda. Dengan demikian maka berubahlah bentuk kedaulatan nasional Indonesia dimana perhitungannya dimulai dari titik pulau terluar sepanjang 12 mil laut yang saling terhubung dan menjadikan satu kesatuan wilayah yang utuh dan lengkap. Peraturan berikutnya adalah berturut-turut ketetapan MPR Tahun 1973, 1978, 1983, 1988, dan 1993 memperkuat Perpu No.4 Tahun 1960 tersebut. Untuk selanjutnya Deklarasi Djuanda tentang konsep negara kepulauan ditetapkan sebagai “Wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan Nasional” (Seruni, 2012).

Visi Indonesia menuju poros maritim dunia tidak akan terwujud tanpa adanya karakter pemerintah yang mendasarinya. Karakter dari sebuah bangsa maritim sebagai salah satu identitas nasionalnya yang mencoba menjaga tegaknya kedaulatan negara kepulauan Indonesia.

visi Indonesia sebagai poros maritim dunia merespon visi politik 4 kekuatan di wilayah regional. Sebelumnya ada Jepang dan India dengan visi "*Confluence of the Two Seas*" yang memproklamirkan pertama kali ungkapan Indo-Pasifik pada 22 Agustus 2007. Kedua adalah kebijakan Amerika Serikat pada November 2011 yaitu *Pivot to the Pacific* atau *Rebalancing Toward Asia* sebagai respon kebangkitan Tiongkok. Ketiga merupakan Visi Tiongkok dengan Jalur Sutra Maritim abad 21 atau *Century Maritime Silk Route Economic Belt* atau *Maritime Silk Road (MSR)* pada 3 Oktober 2013. Pada intinya visi ini melaksanakan pembangunan prasarana transportasi laut dari Tiongkok melintasi Asia Tenggara menuju Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa dan Afrika yang disponsori oleh Tiongkok (Yani & Montratama, 2018). Pemikiran cerdas pemerintah Indonesia untuk dapat mengambil peluang dari pertarungan 4 kekuatan besar politik di kawasan Asia-Pasifik dengan didasari karakter kemaritiman yang kuat memunculkan visi Indonesia Poros Maritim Dunia.

Strategi Pertahanan Semesta Menjaga Identitas Nasional Mendukung Indonesia Poros Maritim Dunia

Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara

menjelaskan bahwa bentuk pertahanan negara bersifat semesta yang memiliki pengertian melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan (Sekretariat Kabinet RI, 2002). Strategi pertahanan semesta merupakan bagian dari sistem pertahanan semesta sebagaimana tertuang dalam undang-undang pertahanan tersebut. Dalam konteks disiplin maka posisi ilmu pertahanan adalah sebagai multi, inter dan trans disiplin bersama dengan disiplin ilmu lainnya. Sedangkan dalam konteks penjenjangan teoritis maka ilmu pertahanan berada pada posisi *grand theory* atas berbagai disiplin ilmu yang relevan dengan masalah yang akan dipecahkan. Sifat permasalahan yang relevan untuk dicarikan solusinya yaitu kompleks dan problematik, *output* yang dihasilkan adalah tertanamnya kesadaran bela negara yang terdiri atas rela berkorban, pantang menyerah dan tanpa pamrih. Sedangkan *outcome* yang dihasilkan yaitu timbulnya *deterrent effect* atau daya tangkal (Tippe, 2016).

Berdasarkan pengertian teori Strategi pertahanan semesta tersebut maka terkait dengan strategi pertahanan

semesta menjaga identitas nasional mendukung poros maritim dunia, terdapat tiga strategi besar pertahanan semesta yang harus diterapkan untuk dapat menjaga identitas nasional sebagai negara maritim yaitu strategi pertahanan semesta menjaga identitas teritorial, strategi pertahanan semesta menjaga identitas budaya maritim dan strategi pertahanan semesta menjaga identitas politik. Diharapkan dari strategi yang diperoleh akan dapat menghasilkan sifat yang rela berkorban untuk membela negara, tanpa pamrih dan pantang menyerah yang tertanam kuat dalam diri tiap insan manusia Indonesia. Sehingga *outcome* yang dihasilkan yaitu timbulnya *effect detterent* atau daya tangkal.

Strategi Pertahanan Semesta Menjaga Identitas Teritorial Mendukung Poros Maritim Dunia.

Posisi Teritorial Indonesia yang merupakan negara kepulauan terletak di wilayah strategis diantara dua samudra dan dua benua menjadikan wilayah Indonesia sebagai jalur pelayaran internasional. Sebagaimana diketahui 40% pelayaran dunia melewati wilayah kedaulatan Indonesia. oleh sebab itu Indonesia dituntut untuk dapat memberikan jaminan keamanan dan keselamatan navigasi pelayaran kapal-

kapal yang berlayar melalui wilayah perairan Indonesia. selain itu kerawanan yang dapat ditimbulkan dengan keluar masuknya kapal-kapal asing di wilayah Indonesia akan rentan dengan tindak kejahatan seperti penyelundupan, kejahatan lintas negara, terorisme, pelanggaran wilayah dan lain sebagainya. kebijakan pemerintah Indonesia dengan penetapan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk menjaga kedaulatan teritorial negara dengan tetap memberikan rasa aman dan hak bernavigasi kapal-kapal internasional yang berlayar melalui wilayah Indonesia. Dengan adanya ALKI ini juga berfungsi untuk meminimalisir jumlah pintu-pintu keluar masuk wilayah kedaulatan NKRI yang jumlahnya sangat banyak mengingat bentuk negara Indonesia adalah negara kepulauan.

Mendasar kepada pemikiran Sarifuddin Tippe tentang pertahanan semesta maka tujuan (*ends*) pertahanan semesta menjaga teritorial sebagai identitas nasional negara maritim adalah terwujudnya Indonesia Poros Maritim Dunia melalui penjagaan kedaulatan teritorial perairan Indonesia (*ways*) dengan memanfaatkan seluruh sumberdaya nasional (*means*). Strategi

tersebut berada dalam tataran *Grand Strategy* sedangkan dalam tataran *Operasional strategy* dapat diturunkan lagi untuk menjaga kedaulatan teritorial perairan Indonesia dengan pengamanan jalur lalu lintas pelayaran internasional/ ALKI dan perairan wilayah perbatasan.

Pengamanan ALKI dapat dilaksanakan dengan mengimplementasikan penyelenggaraan strategi Pertahanan Laut Nusantara melalui operasi matra, operasi gabungan instansi terkait, dan operasi bantuan dukungan kekuatan nasional. Namun demikian dengan banyaknya *stake holder* yang terlibat dalam pengamanan ALKI maka diperlukan sinergitas dan satu komando untuk mempermudah birokrasi dan kordinasi. Sebagaimana disampaikan oleh Lukman dalam (Prakoso, 2020) mensyaratkan bahwa keberhasilan pengamanan ALKI dan perairan Indonesia adalah melalui adanya sinergitas, komunikasi yang baik dan satu komando dalam pergerakan bagi seluruh stakeholder keamanan maritim (Prakoso, Suhirwan, & Prihantoro, 2020).

Untuk pengamanan teritorial perairan perbatasan khususnya pulau-pulau terluar pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan diantaranya Peraturan Badan Nasional

Pengelola Perbatasan (BNPP) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015- 2019. Dalam peraturan ini pemerintah menekankan bagaimana pentingnya kerjasama dengan negara-negara yang mempunyai perbatasan laut langsung dengan Indonesia khususnya sesama negara ASEAN. Kerjasama itu antara lain di bidang ekonomi, kerjasama lintas batas, pertahanan maupun keamanan (Asana, Suwartiningsih, & Bintang, 2014). Kebijakan pemerintah ini sekaligus untuk memperkuat legitimasi dan pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam dimensi identitas nasional kerap kali perbatasan sebagai beranda depan sebuah negara menjadi tolok ukur baik tidaknya pengelolaan negara. Strategi lain dalam pengamanan perbatasan dapat dilaksanakan dengan turut menyertakan peran pemerintah daerah dan masyarakat bekerjasama dan berkoordinasi dengan instansi pengamanan seperti TNI, POLRI dan kementerian Lembaga terkait pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau terluar didukung dengan pembangunan postur pertahanan di pulau-pulau terluar yang dapat berfungsi

sebagai efek deterence terhadap timbulnya ancaman.

Indonesia menyadari bahwa pengelolaan pengamanan wilayah perbatasan juga harus didukung dengan kekuatan diplomasi dan ketegasan penegasan sikap pemerintah terkait permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan dan wilayah yang menjadi bagian dari kedaulatan Negara. Sebagaimana dalam tujuannya, diplomasi digunakan oleh setiap negara untuk mengamankan kepentingan nasional, kebebasan politik dan integritas territorial (Prayuda & Sundari, 2019). Diplomasi juga menjadi bagian penting dalam strategi pertahanan negara yang berifat semesta yang sudah pasti dipengaruhi oleh dinamika lingkungan strategis baik global, regional dan nasional. Dimensi permasalahan diplomasi tidak hanya meliputi permasalahan militer atau pertahanan militer dan sejenisnya, tetapi juga mencakup segala permasalahan non-militer atau pertahanan nirmiliter. Hal ini sejalan dengan pemikiran Jessica Tuchman dan Mathews berpendapat bahwa

Konsep diplomasi pertahanan dalam sistem keamanan nasional tidak hanya sebatas sebagai upaya untuk

menghadapi ancaman dari dimensi militer akibat pengaruh perkembangan global yang terjadi belakangan ini. Namun, dimensi politik, ekonomi, sumber daya alam, lingkungan dan masalah-masalah kependudukan juga menjadi hal yang perlu diperhitungkan (Budi & Berantas, 2014). Oleh karena itu diplomasi yang harus dilaksanakan untuk pengamanan teritorial perbatasan adalah diplomasi total untuk membangun rasa saling percaya diantara negara-negara berbatasan sekaligus meminimalisir dan meniadakan konflik dikawasan. Hal tersebut diperkuat dengan pemikiran Michael Moodley bahwa konsep *cooperative security* secara umum didefinisikan sebagai suatu proses atau bentuk kerjasama dimana negara-negara dengan kepentingan bersama bergabung melalui mekanisme yang telah disepakati untuk mengatasi atau mengurangi perselisihan, mengurangi ketegangan dan kecurigaan, meningkatkan prospek pembangunan ekonomi, membangun kepercayaan diri, dan menjaga stabilitas di kawasan mereka (Kusuma & Anwar, 2020).

Strategi Pertahanan Semesta Menjaga Identitas Budaya Maritim Mendukung Poros Maritim Dunia.

Salah satu unsur terpenting identitas nasional sebagai negara maritim

adalah budaya maritim yang mutlak harus dimiliki oleh suatu bangsa yang akan menguatkan image atau anggapan bahwa bangsa tersebut pantas disebut sebagai bangsa maritim. Kembali menggunakan pemikiran Sarifuddin Tippe tentang pertahanan semesta maka tujuan (*ends*) pertahanan semesta menjaga Budaya Maritim sebagai identitas nasional negara maritim adalah terwujudnya Indonesia poros maritim dunia melalui penjagaan budaya maritim Indonesia (*ways*) dengan memanfaatkan seluruh sumberdaya nasional (*means*). Strategi tersebut dapat diturunkan kembali kedalam tataran *operasional strategy* yaitu dengan penanaman dan penumbuhan mental maritim kepada masyarakat Indonesia serta peningkatan ekonomi kelautan Indonesia.

Dalam buku *The Influence of Sea Power* karya AT Mahan menyebutkan bahwa budaya maritim memiliki peran penting bagi sebuah bangsa yang ingin membangun kejayaan maritimnya. Sebagaimana disampaikan dalam hasil penelitian bahwa budaya maritim yang ada di Indonesia saat ini memang dalam kondisi yang memprihatinkan. Data yang diperoleh menunjukkan jumlah penduduk Indonesia yang bergerak dalam bidang kemaritiman hanya sebesar 2,3 juta orang

hal ini berarti tidak sampai 1% dari jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan. Sangat miris melihat konfigurasi geografi Indonesia yang didominasi dengan wilayah perairan laut yang mencapai 2/3 wilayah keseluruhan luas wilayah Indonesia. Kondisi yang demikian akan menjadi kendala dalam upaya mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oleh karenanya diperlukan upaya-upaya atau strategi khusus untuk dapat menjaga dan meningkatkan budaya maritim bangsa Indonesia yang pernah mencapa kejayaannya pada jaman Majapahit dan Sriwijaya.

Strategi menanamkan dan menumbuhkan kembali mental maritim atau kebaharian sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Angkatan Laut sebagai komponen utama pertahanan di laut dengan melalui pembinaan potensi maritim (Binpotmar). Berdasarkan doktrin TNI AL *Jalesveva Jayamahe* maka salah satu tugas TNI AL diantaranya melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut (TNI AL, 2018). Pemberdayaan wilayah pertahanan laut dapat dilakukan melalui beberapa metode seperti Operasi Bhakti Surya Bhaskara Jaya, Operasi Bhakti TNI AL, Mobile Market dan Bhakti Sosial Kesehatan (Mustari et al., 2018). Operasi

Bhakti ini merupakan upaya untuk membantu pemerintah dalam pemerataan pembangunan wilayah terpencil terutama pulau-pulau kecil yang tidak dapat dijangkau oleh transportasi darat maupun udara (Marsetio, 2015). Dengan kehadiran negara di wilayah terpencil ini akan mendongkrak nasionalisme penduduk setempat sekaligus dapat menumbuhkan budaya maritim dalam artian kesadaran mereka tentang bahwa laut adalah pemersatu gugusan pulau di nusantara bukan menjadi pemisah. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran kapal-kapal TNI AL yang melaksanakan bhakti sosial. Selain itu TNI AL juga melaksanakan pembinaan pemuda-pemudi Indonesia untuk mencintai kebaharian melalui gerakan pramuka Saka Bahari. Melalui pembinaan secara informal ini diharapkan akan menanamkan cinta tanah air melalui aspek kebaharian. Pembinaan sejak dini ini akan memupuk jiwa dan budaya maritim generasi muda untuk mencintai lautan dan melihat lautan adalah harapan dan masa depan mereka.

Strategi berikutnya dalam menjaga budaya maritim adalah dengan membangun perekonomian kelautan. Ekonomi kelautan harus menjadi prioritas pemerintah Indonesia untuk dapat

mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia yang merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia memiliki potensi sumber daya alam laut yang melimpah. Dahuri dalam (Masetio 2015) menyampaikan bahwa setidaknya terdapat sebelas sektor ekonomi yang dapat dikembangkan seperti industri pengolahan hasil perikanan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri bioteknologi kelautan, perhubungan laut, pertambangan dan energi, kehutanan, pariwisata bahari, sumber daya pulau-pulau kecil, sumber daya alam nonkonvensional serta industri jasa maritim (Marsetio, 2015).

Doktrin Poros Maritim mengandung peran mempromosikan pembangunan kelautan nasional yang sinergis dan ekonomi maritim dengan pembangunan tol laut sebagai implementasi target pembangunan ekonomi. Tol laut merupakan upaya untuk menciptakan perhubungan laut yang efektif berupa ketersediaan kapal yang melakukan pelayaran secara terjadwal dan rutin dari wilayah barat sampai ke timur Indonesia (Prihartono, 2015). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas telah merencanakan konsep tol laut yang dicanangkan oleh

Presiden Joko Widodo, dengan 24 pelabuhan. Pelabuhan-pelabuhan tersebut terdiri dari pelabuhan pengumpul, pelabuhan utama dan pelabuhan yang menjadi hubungan internasional (Kadar, 2015). Kehadiran pelabuhan ini merupakan salah satu upaya untuk menekan terjadinya disparitas harga yang terjadi diantara wilayah di Indonesia. pembangunan pelabuhan tersebut juga berfungsi untuk meningkatkan pemerataan distribusi logistik nasional sehingga terwujud kesejahteraan rakyat yang adil dan merata. Pembangunan pelabuhan juga dibarengi dengan pembangunan amada niaga yang akan menyatukan seluruh wilayah Indonesia dengan pelayaran nasional dan membantu meningkatkan perekonomian disektor maritim. Pembangunan ekonomi maritim/kelautan ini akan mendorong dan membuka wawasan masyarakat Indonesia tentang kemaritiman dimana pogram besar pemerintah ini membutuhkan sumberdaya manusia maritim yang tidak sedikit sehingga membuka peluang masyarakat indonesia utnuk kembali mencintai laut dan maritim sebagai salah satu sumber mata pencaharian atau profesi bagi mereka.

Strategi Pertahanan Semesta Menjaga Identitas Politik Mendukung Poros Maritim Dunia

Identitas politik suatu bangsa identik dengan aturan dan kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintahannya sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Guibernau dalam Anthony D Smith : *Nation and National Identity* berpendapat bahwa dimensi politik identitas nasional bersumber dari hubungannya dengan negara-bangsa modern. Sebagai institusi politik yang mengatur populasi yang beragam, dari saat dasarnya negara-bangsa mengejar homogenisasi budaya dan bahasa dari warga negara yang beragam(Guibernau, 2004). Menjelaskan bahwa kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh institusi politik dalam hal ini pemerintah dapat menjadi ciri atau identitas tertentu sebuah bangsa.

Terkait dengan Penetapan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia tentunya mewakili ciri bangsa Indonesia yang tumbuh sebagai bangsa maritim. Keputusan Presiden Joko Widodo tentang visi maritim ini sudah pasti melalui berbagai pertimbangan dan disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang berkembang saat ini. Sebagaimana hasil penelitian

yang didapat menjelaskan bahwa kebijakan poros maritim dunia ini merupakan respon Indonesia terhadap visi politik 4 kekuatan di wilayah regional yaitu Jepang dan India dengan visi "Confluence of the Two Seas", Amerika dengan *Pivot to the Pacific* atau *Rebalancing Toward Asia*, Tiongkok dengan Jalur Sutra Maritim abad 21 atau *Century Maritime Silk Route Economic Belt* atau *Maritime Silk Road* (MSR). Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia hadir untuk menseimbangkan kepentingan 4 visi kekuatan politik besar di kawasan Asia Pasifik sekaligus mengambil peluang didalamnya. Pada dasarnya 4 visi kekuatan politik diatas adalah untuk mengamankan jalur pelayaran, akses ke wilayah pemasaran, akses ke wilayah sumber daya alam dan Indonesia berada diantara 4 kepentingan dunia tersebut. Posisi strategis Indonesia ini yang dijadikan sebagai salah satu dasar munculnya ide visi Indonesia poros maritim dunia ini. Indonesia harus dapat mengambil peluang dan berperan aktif dalam perkembangan lingkungan strategis ini.

Untuk dapat berperan aktif dan menjaga kesinambungan kebijakan poros maritim dunia ini maka diperlukan strategi pertahanan semesta yang dapat

menjamin keberlangsungan kebijakan pemerintah dimana kebijakan tersebut adalah visi maritim itu sendiri.

Arthur F. Lykke, Jr dalam Yarger (*Strategic Theory For The 21st Century : The Little Book On Big Strategy* Yarger, 2006) menyatakan bahwa peran strategi adalah untuk memastikan bahwa pengejaran, perlindungan, atau kemajuan kepentingan yang dicapai melalui penerapan instrumen kekuasaan pada tujuan tertentu untuk menciptakan efek strategis yang mendukung kepentingan berdasarkan pedoman kebijakan dicapai secara koheren dan optimal. Proses strategis adalah tentang bagaimana (*concept or ways*) kepemimpinan akan menggunakan kekuasaan (*resources or means*) yang dimiliki negara untuk menjalankan kendali atas rangkaian kondisi dan posisi geografis guna mencapai tujuan (*ends*) sesuai dengan kebijakan negara. Menunjukkan bagaimana visi Indonesia Poros Maritim Dunia ini hadir ditengah-tengah empat visi negara kawasan yang memiliki kepentingan di wilayah Indo-Pasifik.

Dengan demikian Strategi pertahanan yang dibangun adalah Strategi pertahanan semesta menjaga visi Indonesia poros maritim dunia. mengawal kebijakan Indonesia ini

bukanlah perkara yang mudah dihadapkan kepada kepentingan negara lain terhadap kawasan regional Asia Tenggara. Oleh karena itu strategi pertahanan yang tepat digunakan untuk menjaga visi maritim ini adalah dengan menggunakan diplomasi pertahanan. Diplomasi pertahanan menjadi instrumen penting dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan keamanan suatu negara.

Terkait dengan implementasi dari diplomasi pertahanan dalam kerjasama pertahanan di lingkup *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dimana ASEAN telah menetapkan dasar berperilaku bagi negara-negara anggotanya, hubungan antara negara satu dengan yang lainnya begitu pula dengan kekuatan eksternal yang mendorong kepada kerja sama serta membangun rasa saling percaya (*Confidence Building Measure*) khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan. Menghadapi dinamika keamanan kawasan Asia Tenggara, Indonesia bersama dengan negara ASEAN lainnya dapat mengkomunikasikan kepentingan pertahanan masing-masing negara tersebut kepada negara-negara kawasan melalui wadah *ASEAN Defence Ministerial Meeting* (ADMM) yang terbentuk pada 2006. Keberadaan ADMM menjadi salah

satu dasar kuat terbentuknya pilar ASEAN *Community* yaitu ASEAN *Political and Security Community* (APSC) (Rusfiana, 2018). Dialog dalam rangka keamanan kawasan juga dilaksanakan mengundang negara-negara bukan anggota ASEAN yang mempunyai kepentingan di wilayah Asia Tenggara seperti China, India, Australia, Jepang dan Amerika Serikat dalam forum ADMM+1, ADMM+2 dan ASEAN *Regional Forum* (ARF).

Diplomasi pertahanan ini secara langsung memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus menjaga kebijakan visi Indonesia poros maritim dunia agar tidak bersinggungan dengan kepentingan nasional negara lain dan 4 visi politik kekuatan regional Asia Pasifik lainnya sehingga visi ini dapat diwujudkan dan dijalankan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Identitas nasional harus dipahami sebagai sesuatu yang sudah menjadi bagian dari kehidupan suatu bangsa dan berlangsung lama. Sekalipun bagian tersebut sudah menjadi sejarah dan sudah lama ditingalkan, namun tidak dapat hilang karena adanya unsur-unsur pembentuk identitas yang bersifat tetap seperti wilayah atau kondisi geografi. Identitas dapat dibangkitkan kembali

sehingga dapat berkontribusi kepada semangat nasionalisme dan bela negara.

Strategi pertahanan semesta menjaga identitas nasional mendukung Indonesia poros maritim dunia memunculkan tiga *grand strategy* yaitu strategi pertahanan semesta menjaga kedaulatan teritorial, strategi pertahanan semesta menjaga budaya maritim dan strategi pertahanan semesta menjaga visi politik negara yang kesemuanya bertujuan untuk mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dari strategi-strategi tersebut diperoleh berbagai strategi turunan dalam tataran operasional. Dari dimensi kedaulatan teritorial memunculkan strategi pertahanan semesta pengamanan alur pelayaran internasional dan teritorial perairan perbatasan. Dari dimensi budaya maritim memunculkan strategi pertahanan semesta pembinaan wilayah pertahanan dan penguatan ekonomi maritim. Terakhir dari dimensi kebijakan politik mendapatkan strategi pertahanan semesta penguatan diplomasi pertahanan. Dari semua strategi yang didapat, integrasi seluruh komponen bangsa adalah hal yang harus dapat diwujudkan dalam konsep strategi pertahanan semesta sebagai strategi raya.

Rekomendasi

Pembangunan sumber daya manusia maritim adalah hal utama yang harus dilakukan oleh negara Indonesia untuk mampu mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim dunia. pembangunan manusia maritim tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan formal sekolah kemaritiman atau balai-balai pelatihan kebaharian. Hal tersebut karena sumber daya manusia merupakan unsur utama dari semua strategi.

Pembangunan postur pertahanan negara di laut yang dapat menimbulkan efek gentar perlu segera diwujudkan yang sekaligus dapat memberikan jaminan kedaulatan teritorial laut Indonesia khususnya wilayah perbatasan dari segala bentuk ancaman. Selain itu Indonesia perlu memperbanyak dan memperkuat kerjasama pertahanan dengan negara-negara kawasan untuk dapat membangun rasa saling percaya sebagai tujuan antara sekaligus mengawal terwujudnya visi poros maritim dunia sebagai tujuan utama.

Daftar Pustaka.

- Adam, L. (2015). Kebijakan konektivitas maritim di Indonesia. *Jurnal Politica*, 6(1), 20–41. Retrieved from <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/302>
- Arsyad, H. H. (2015). Peluang Dan Tantangan Kerjasama Indonesia-

- Filipina Dalam Menangani Illegal Fishing. Hasanudin University, Makassar.
- Asana, R., Suwartiningsih, S., & Bintang, A. (2014). Kebijakan Pertahanan Indonesia Terhadap Pulau-Pulau Kecil Terluar Pada Masa Pemerintahan Jokowi. *Jurnal Cakrawala*, 16(93), 6248.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Hasil Sensus Penduduk 2020. *Berita Resmi Statistik*, 7(1), 1–16.
- Bakry, U. S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Biro Komunikasi dan Informasi Publik. (2018). Empat Puluh Persen Jalur Perdagangan Dunia Melewati Indonesia. Retrieved February 17, 2021, from Kementerian Perhubungan website: <http://dephub.go.id/post/read/empat-puluh-persen-jalur-perdagangan-dunia-melewati-indonesia#:~:text=jakarta> – Sebanyak 90%25 dari jalur, sistem transportasi laut yang terintegrasi.
- Budi, T., & Berantas, S. (2014). Diplomasi Pertahanan Sebagai Bagian Dari Diplomasi Total Ri Defense Diplomacy As Part of the Total Indonesian Diplomacy. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 4(2), 165–184.
- Guibernau, M. (2004). Anthony D. Smith on nations and national identity: A critical assessment. *Nations and Nationalism*, 10(1–2), 125–141. <https://doi.org/10.1111/j.1354-5078.2004.00159.x>
- Hidayat, S., & Ridwan. (2017). Kebijakan Poros Maritim dan Keamanan Nasional Indonesia: Tantangan dan Harapan. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7(3), 107–121. Retrieved from <http://139.255.245.6/index.php/JPBH/article/view/232/124>
- Juan, dynash. (2013). Letak Geografis Indonesia. *Letak Geografis Indonesia*, 4(geografis indonesia), 1–4. Retrieved from <https://mtsalinayah.files.wordpress.com/2011/12/ips7letak-geo.pdf>
- Kadar, A. (2015). Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(3), 427–442. <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i3.33>
- Kemenko maritim dan investasi. (2019). Susun Acuan Strategi Pembangunan Kemaritiman Pemerintah Segera Rampungkan Perhitungan PDB Maritim. Retrieved February 19, 2021, from maritim.go.id website: <https://maritim.go.id/susun-acuan-strategi-pembangunan-kemaritiman-pemerintah-segera-rampungkan-2/>
- Kusuma, E., & Anwar, S. (2020). Implementation of the Philippines-Indonesia Coordinated Patrol in the Sea Border Area of Indonesia and the Philippines from the Sea Power Perspective. *Journal of Social and Political Sciences*, 3(4). <https://doi.org/10.31014/aior.1991.03.04.243>
- Marsetio. (2013). Strategi Tni Angkatan Laut Dalam Pengamanan Batas Maritim Nkri: Kajian Historis-Strategis. *Citra Lekha*, 17(1), 1-18–18.
- Marsetio. (2015). *Aktualisasi Peran Pengawasan Wilayah Laut Dalam Mendukung Pembangunan Indonesia Sebagai Negara Maritim Yang Tangguh*.

- Mulya, L. (2013). Postur maritim Indonesia: pengukuran melalui teori Mahan. *Lembaran Sejarah*, 10(2).
- Mustari, B., Supartono, & Barnas, R. (2018). Strategi Pertahanan Laut Nusantara Dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta*, 4(2), 17–36. Retrieved from <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPS/article/view/285>
- Prakoso, L. Y., Suhirwan, S., & Prihantoro, K. (2020). Sea Defense Strategy and Urgency of Forming Maritime Command Center. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi Ttg Kajian & Strategi Pertahanan Yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity*, 6(2), 200. <https://doi.org/10.33172/jp.v6i2.721>
- Prayuda, R., & Sundari, R. (2019). Diplomasi dan Power: Sebuah Kajian Analisis. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 02(1), 80–93. Retrieved from <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/index>
- Rusfiana, Y. (2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Asean Defence Ministerial Meeting (Admm). *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 4(2), 145–164. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v4i2.335>
- Rustam, I. (2018). Makna Strategis Selat Lombok dan Perkembangannya Sebagai Jalur Pelayaran Internasional. *Global Dan Policy*, 6(1), 83–100. Retrieved from <http://www.ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jgp/article/view/1884>
- Sekretariat Kabinet RI. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002*, (1), 1–5. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2007.03.021>
- Seruni, R. (2012). Geopolitik Indonesia. *Universitas Ahmad Dahlan*, 1–32. Retrieved from <http://eprints.uad.ac.id/9435/1/geopolitik-indonesia-Dwi.pdf>
- Suib, M. Syaiful, & Sakdiyah, H. (2019). alam Menghadapi Era Globalisasi Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan*, 3(1), 52–70.
- Tippe, S. (2016). Strategi Pertahanan Semesta: Memahami. *Journal UIR*, 1(Nov), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016>
- TNI AL. (2018). *Doktrin Tni Al Jalesveva Jaya Mahe* (p. 95). p. 95. Jakarta: TNI AL.
- Vedina, R., & Baumane, I. (2009). The construction of national identity among minorities and its manifestation in organisations: The case of Latvia. *Baltic Journal of Management*, 4(1), 94–105. <https://doi.org/10.1108/17465260910930476>
- Wiranto, S. (2020). Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia Melalui Kebijakan Kelautan Indonesia dengan Strategi Pertahanan Maritim Indonesia: Perspektif Pertahanan Maritim. *Jurnal Maritim Indonesia*, 8(2), 110–126. Retrieved from <http://pusjianmar-seskoal.tnial.mil.id/index.php/IMJ/article/view/35>
- Yani, Y. M., & Montratama, I. (2018). Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Suatu Tinjauan Geopolitik.

Jurnal Pertahanan & Bela Negara,
5(2), 25–52.
<https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i2.356>

Yarger, H. R. (2006). *Strategic Theory For The 21st Century : The Little Book On Big Strategy*. In *Strategy*. Carlisle. Retrieved from <http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/>

Yudhyarta, D. Y. (2015). Korelasi Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Karakter Bangsa. *MITRA PGMI: Jurnal Kependidikan MI*, 1(1), 113–126.
<https://doi.org/10.46963/mpgmi.v1i1.36>